

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Uni Afrika dalam penyelesaian konflik antara *Tigray People's Liberation Front (TPLF)* dan Pemerintah Ethiopia pada periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa konflik ini merupakan salah satu tantangan terbesar bagi stabilitas di kawasan Tanduk Afrika. Konflik ini dipicu oleh perselisihan politik dan ketidakpuasan etnis Tigray terhadap pemerintahan pusat, yang semakin memanas setelah pemilu Tigray pada 2020 yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah federal Ethiopia.

Uni Afrika, sebagai organisasi regional dengan mandat menjaga perdamaian di Afrika, berupaya memediasi konflik melalui *African Peace and Security Architecture (APSA)* dengan menginisiasi perundingan damai, menunjuk utusan khusus, serta mengeluarkan berbagai pernyataan yang menyerukan penghentian kekerasan. Namun, efektivitas peran Uni Afrika terbatas akibat kurangnya *political will* dari pihak yang bertikai, keterlibatan aktor eksternal seperti Eritrea, serta lemahnya kapasitas implementasi mekanisme intervensi APSA.

Meskipun Uni Afrika telah mengadopsi berbagai strategi perdamaian seperti diplomasi preventif, peringatan dini, dan mediasi, implementasi strategi ini dalam konflik Tigray menghadapi hambatan signifikan. Faktor utama yang menjadi kendala adalah prinsip kedaulatan negara yang dipegang teguh oleh Ethiopia, kurangnya sumber daya untuk intervensi militer, serta koordinasi yang kurang efektif dengan organisasi internasional lainnya, seperti PBB dan Uni Eropa. Perjanjian damai yang dimediasi oleh Uni Afrika pada 2022 menjadi langkah positif

dalam penyelesaian konflik, namun tantangan rekonstruksi pasca-konflik masih besar. Stabilitas jangka panjang di Ethiopia bergantung pada keberlanjutan implementasi kesepakatan damai, reformasi politik yang inklusif, serta rekonsiliasi nasional yang efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas peran Uni Afrika dalam menangani konflik di masa depan adalah sebagai berikut.

1. Uni Afrika perlu memperkuat kapasitas Continental Early Warning System (CEWS) dengan membentuk pusat analisis data regional yang bekerja sama dengan universitas, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil di tiap kawasan. Selain itu, perlu adanya pelatihan intensif bagi analis CEWS dalam penggunaan teknologi *big data* dan *artificial intelligence* untuk meningkatkan akurasi prediksi konflik. Uni Afrika juga dapat mengembangkan sistem pelaporan digital berbasis komunitas (*community-based conflict monitoring system*) yang memungkinkan pelaporan potensi konflik secara real-time dari masyarakat lokal.
2. Menegaskan komitmen terhadap prinsip *non-indifference*, Uni Afrika perlu merancang mekanisme evaluasi berkala terhadap komitmen negara anggota, termasuk melalui laporan tahunan tentang kepatuhan terhadap prinsip APSA yang dipublikasikan secara terbuka. Di samping itu, Uni Afrika dapat memberikan

insentif politik dan ekonomi bagi negara anggota yang secara aktif mendukung misi perdamaian regional, serta menerapkan sanksi terhadap negara yang secara terang-terangan mengabaikan pelanggaran HAM berat.

3. Uni Afrika juga dapat memperkuat kemitraan strategis dengan PBB dan organisasi regional seperti IGAD, dengan membentuk *Joint Peace Support Operations Planning Unit* yang terintegrasi dan berbasis tugas (*task-oriented*). Unit ini akan memastikan bahwa dukungan internasional dalam hal pendanaan, logistik, dan pelatihan dapat disalurkan secara langsung ke operasi lapangan Uni Afrika, bukan hanya melalui jalur birokrasi yang panjang.
4. Guna memastikan perdamaian berkelanjutan di Ethiopia, Uni Afrika perlu menginisiasi program jangka panjang pasca-konflik yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, pemuda, dan perempuan secara aktif dalam proses rekonsiliasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendanaan khusus untuk program *community dialogue*, pelatihan mediasi lokal, serta pemberdayaan ekonomi korban konflik melalui skema hibah dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, Uni Afrika perlu mendorong pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*Truth and Reconciliation Commission*) yang independen dan inklusif di Ethiopia sebagai langkah konkret menuju keadilan transisional.